

Kebocoran Ekonomi dalam Pariwisata Perkotaan Indonesia, Mengapa Efek Pengganda Lokal Lebih Kecil daripada yang Dijanjikan

Economic Leakage in Indonesian Urban Tourism: Why the Local Multiplier Is Smaller Than Promised

Muhammad Rahmad¹, Elyn Hastriana²

¹Institut Pariwisata Trisakti; ²Pusat Kajian Pariwisata dan Ekonomi Indonesia

muhammadrahmad@iptrisakti.ac.id; ehastriana@gmail.com

ABSTRAK

Hampir setiap rencana pengembangan pariwisata perkotaan di Indonesia menjanjikan efek pengganda bagi perekonomian setempat. Janji tersebut jarang diuji, dan ketika penerimaan daerah maupun pendapatan warga tidak bergerak sebanding dengan naiknya kunjungan, penjelasan yang muncul umumnya berhenti pada dugaan bahwa datanya belum lengkap. Artikel ini menawarkan penjelasan yang berbeda. Kajian kebocoran ekonomi pariwisata di Indonesia hampir seluruhnya berlatar destinasi kepulauan dan pedesaan, dan kerangka yang dipakainya adalah kerangka enklave yang mengandaikan kawasan wisata terpisah dari perekonomian sekitarnya. Kota tidak berperilaku demikian, karena kota tidak berpagar dan perekonomiannya beragam. Akibatnya, kebocoran di kota tidak terlihat oleh kerangka yang ada, meskipun besarnya belum tentu lebih kecil. Melalui telaah pustaka integratif dan pembacaan atas kajian kebocoran mutakhir di Indonesia, artikel ini mengusulkan Kerangka Empat Pintu Kebocoran Perkotaan yang terdiri dari pintu rantai pasok, pintu kepemilikan dan laba, pintu perantara digital, serta pintu tenaga kerja dan pengetahuan. Artikel ini juga mengajukan satu perbedaan yang selama ini kabur, yaitu antara kebocoran nasional yang mengalir ke luar negeri dan kebocoran kewilayahan yang mengalir ke kota lain di dalam negeri. Perbedaan tersebut penting karena neraca satelit pariwisata disusun pada tingkat nasional, sehingga aliran nilai dari kota daerah menuju kantor pusat di ibu kota tidak tercatat sebagai kebocoran sama sekali. Sebagai gantinya, artikel ini mengusulkan ukuran yang lebih berguna daripada persentase kebocoran, yaitu nilai tertahan setempat untuk setiap satu juta rupiah belanja wisatawan.

Kata kunci: kebocoran ekonomi, efek pengganda, pariwisata perkotaan, rantai nilai, neraca satelit pariwisata

ABSTRACT

Almost every urban tourism development plan in Indonesia promises a multiplier effect for the local economy. That promise is rarely tested, and when regional revenue and household incomes fail to move in proportion to rising arrivals, the explanation usually stops at the suspicion that the data are incomplete. This article offers a different explanation. Studies of tourism economic leakage in Indonesia are set almost entirely in island and rural destinations, and the framework

they employ is the enclave framework, which assumes a tourist zone separated from the surrounding economy. Cities do not behave that way, being neither fenced nor economically narrow. As a result, urban leakage is invisible to the existing framework, although it is not necessarily smaller. Through an integrative literature review and a reading of recent Indonesian leakage studies, this article proposes a Four Urban Leakage Gates framework comprising the supply chain gate, the ownership and profit gate, the digital intermediary gate, and the labour and knowledge gate. The article further advances a distinction that has remained blurred, namely between national leakage flowing abroad and territorial leakage flowing to other cities within the country. This distinction matters because tourism satellite accounts are compiled at national level, so value flowing from a regional city to a head office in the capital is not recorded as leakage at all. In its place, the article proposes a measure more useful than a leakage percentage, namely the value retained locally for every one million rupiah of visitor spending.

Keywords: *economic leakage, multiplier effect, urban tourism, value chain, tourism satellite account*

1. PENDAHULUAN

Ada satu kalimat yang muncul di hampir setiap dokumen pengembangan pariwisata perkotaan di Indonesia, dan kalimat itu jarang sekali diuji. Kalimatnya berbunyi bahwa pengembangan pariwisata akan menghasilkan efek pengganda bagi perekonomian setempat.

Gagasan efek pengganda sendiri tidak keliru. Uang yang dibelanjakan wisatawan memang berpindah tangan beberapa kali, dan setiap perpindahan menciptakan pendapatan bagi pihak berikutnya. Persoalannya terletak pada besaran dan arah. Berapa kali uang tersebut berpindah tangan sebelum meninggalkan kota, dan siapa yang menerimanya pada setiap perpindahan, merupakan pertanyaan yang menentukan tetapi hampir tidak pernah dijawab dengan data.

Ketika hasil yang dijanjikan tidak muncul, penjelasan yang beredar umumnya berkisar pada tiga hal. Pertama, jumlah kunjungan dianggap belum cukup besar. Kedua, lama tinggal dianggap terlalu pendek. Ketiga, data dianggap belum lengkap sehingga dampaknya belum terukur. Ketiga penjelasan itu masuk akal, tetapi ketiganya memiliki kelemahan yang sama, yaitu semuanya memusatkan perhatian pada seberapa besar uang yang masuk, dan tidak satu pun mempertanyakan seberapa cepat uang itu keluar.

Pertanyaan tentang uang yang keluar sesungguhnya sudah lama dibahas dalam literatur kepariwisataan melalui gagasan kebocoran ekonomi. Britton (1982) merumuskan dasar kritiknya dengan menunjukkan bahwa struktur kepemilikan dan penguasaan saluran pemasaran menempatkan destinasi di negara berkembang pada kedudukan yang lemah dalam rantai nilai kepariwisataan. Sejak itu berkembang banyak kajian yang mengukur berapa besar bagian belanja wisatawan yang tidak tertahan di destinasi.

Meskipun demikian, hampir seluruh kajian tersebut berlatar destinasi kepulauan, destinasi pantai, atau destinasi pedesaan. Anderson (2013) meneliti kebocoran di Zanzibar. Lejárraga dan

Walkenhorst (2010) menelaah keterkaitan dan kebocoran pada perekonomian kecil yang bertumpu pada pariwisata. Di Indonesia, pola yang sama berulang. Margayawati dkk. (2025) meneliti kebocoran di Kabupaten Badung. Here dan Solihin (2026) menelaah gejala pariwisata enklave dan kebocoran ekonomi di Nusa Tenggara Timur.

Kesamaan latar tersebut bukan kebetulan, karena kerangka yang dipakai memang lahir dari sana. Kerangka enklave mengandaikan adanya kawasan wisata yang relatif terpisah dari perekonomian sekitarnya, dengan batas yang cukup jelas dan dengan perekonomian setempat yang sempit ragamnya. Pada keadaan semacam itu, kebocoran mudah dilihat karena aliran keluarnya terang benderang.

Kota tidak berperilaku demikian. Kota tidak berpagar, perekonomiannya beragam, dan kegiatan wisata bercampur dengan kegiatan ekonomi lain yang jauh lebih besar. Akibatnya, kebocoran di kota tidak tampak sebagai aliran yang terang, melainkan tersamar di dalam kegiatan ekonomi biasa. Pembayaran ke pemasok bahan makanan, potongan komisi pemesanan daring, dan pengiriman laba ke kantor pusat semuanya tampak sebagai transaksi bisnis yang wajar, dan memang wajar, tetapi jumlahnya menentukan apakah janji efek pengganda dapat ditepati.

Dari uraian tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan. Pertama, mengapa kerangka kebocoran yang ada kurang mampu menangkap keadaan kota. Kedua, melalui pintu apa saja nilai keluar dari perekonomian kota wisata. Ketiga, ukuran seperti apa yang lebih berguna bagi pengambil keputusan di kota daripada persentase kebocoran.

Tujuan artikel ini adalah menyusun kerangka kebocoran yang sesuai dengan watak perkotaan, memisahkan dua jenis kebocoran yang selama ini bercampur, dan mengusulkan ukuran yang dapat dipakai dalam perencanaan. Sumbangan yang diharapkan bersifat konseptual sekaligus metodologis, karena artikel ini juga menunjuk celah pengukuran pada sistem statistik kepariwisataan yang berlaku.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efek Pengganda dan Cara Mengukurnya

Gagasan efek pengganda dalam kepariwisataan berakar pada analisis masukan keluaran. Fletcher (1989) menelaah penggunaan analisis masukan keluaran dalam kajian dampak kepariwisataan dan menegaskan bahwa besaran pengganda sangat bergantung pada tingkat keterkaitan antarsektor dalam perekonomian yang diukur. Archer dan Fletcher (1996) memperlihatkan penerapannya pada perekonomian kecil dan menunjukkan bahwa pengganda pada perekonomian yang bergantung pada impor cenderung rendah.

Perlu ditegaskan satu hal yang sering terlewat. Besaran pengganda bukan sifat bawaan kepariwisataan, melainkan sifat perekonomian tempat kepariwisataan itu berlangsung. Sektor yang sama dapat menghasilkan pengganda besar di satu tempat dan pengganda kecil di tempat lain, bergantung pada seberapa banyak kebutuhannya dipenuhi dari dalam.

Pada tingkat nasional, pengukuran dampak kepariwisataan kini dibakukan melalui neraca satelit pariwisata. Kerangka metodologisnya dirumuskan bersama oleh sejumlah lembaga internasional dalam kerangka yang lazim disebut kerangka metodologi yang disarankan (United Nations dkk., 2010). Di Indonesia, Badan Pusat Statistik menyusun neraca satelit pariwisata secara berkala, dengan terbitan mutakhir mencakup periode 2019 hingga 2023 (BPS, 2025).

Neraca satelit merupakan kemajuan besar karena ia menertibkan batas sektor kepariwisataan yang selama ini kabur. Namun ia disusun pada tingkat nasional, dan justru di situlah letak keterbatasannya bagi pembahasan artikel ini.

2.2 Kebocoran Ekonomi dan Kritik terhadapnya

Gagasan kebocoran menyatakan bahwa tidak seluruh belanja wisatawan tertahan di destinasi. Sebagian mengalir keluar untuk membayar barang impor, membayar tenaga kerja pendatang, membayar bunga dan laba kepada pemilik dari luar, serta membayar jasa perantara.

Britton (1982) menempatkan gejala ini dalam kerangka ekonomi politik dan menunjukkan bahwa kedudukan destinasi dalam rantai nilai kepariwisataan sering ditentukan oleh pihak yang menguasai saluran pemasaran, bukan oleh pihak yang memiliki sumber daya wisatanya. Meyer (2007) mengalihkan pembicaraan dari kebocoran menuju keterkaitan, dengan alasan bahwa memperkuat keterkaitan ke belakang lebih dapat dikerjakan daripada sekedar mengeluhkan kebocoran. Mitchell dan Ashley (2010) mengembangkan pendekatan rantai nilai untuk menelusuri ke mana uang wisatawan sesungguhnya mengalir dan pada titik mana penduduk berpendapatan rendah dapat masuk.

Kritik penting datang dari Sandbrook (2010), yang mengingatkan bahwa gagasan kebocoran sering dipakai secara berlebihan dan kadang menyesatkan. Angka kebocoran yang tinggi tidak dengan sendirinya berarti buruk, karena sebagian pengeluaran keluar memang diperlukan dan efisien. Yang lebih berarti menurutnya adalah berapa besar penerimaan yang benar-benar tertahan di tingkat setempat, bukan berapa besar persentase yang keluar. Peringatan ini penting bagi artikel ini dan akan dipakai untuk merumuskan ukuran yang diusulkan pada bagian akhir.

2.3 Kajian Kebocoran di Indonesia

Kajian kebocoran di Indonesia berkembang terutama pada destinasi yang bercorak enklave.

Margayawati dkk. (2025) meneliti persoalan kebocoran di Kabupaten Badung, Bali, melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, pengamatan, dan telaah dokumen pada kawasan Kuta, Seminyak, dan Nusa Dua. Mereka mengidentifikasi tiga pendorong utama kebocoran, yaitu lemahnya penegakan aturan, penguasaan usaha oleh pihak asing, serta terbatasnya keikutsertaan warga setempat dalam usaha kepariwisataan. Kajian tersebut juga menyoroti keberadaan usaha yang beroperasi tanpa izin dan menghindari kewajiban perpajakan.

Here dan Solihin (2026) menelaah gejala pariwisata enklave di Nusa Tenggara Timur dengan membandingkan perkembangan produk domestik regional bruto per kapita antara kabupaten berbasis pariwisata dan kota yang bukan pusat pariwisata pada periode 2018 hingga 2023, disertai penguraian pola belanja wisatawan nusantara. Temuan mereka menunjukkan bahwa lonjakan kunjungan tidak diikuti kenaikan kesejahteraan rata-rata penduduk setempat, dengan produk domestik regional bruto per kapita di kabupaten berbasis pariwisata justru lebih rendah daripada pembandingnya. Penguraian belanja wisatawan menunjukkan bahwa bagian terbesar mengalir ke sektor padat modal berupa akomodasi dan transportasi, sementara bagian yang mencapai sektor ekonomi akar rumput jauh lebih kecil.

Kedua kajian tersebut berharga dan hasilnya meyakinkan. Yang perlu dicatat adalah bahwa keduanya berlatar destinasi dengan corak enklave yang kuat. Belum tersedia kajian setara yang berlatar kota besar, padahal justru di kota besarlah sebagian besar belanja wisatawan nusantara berlangsung.

Kekosongan ini merupakan contoh dari keadaan yang dicatat Page dan Duignan (2023), bahwa pariwisata perkotaan tetap merupakan ranah riset yang paradoksal, kaya secara empiris namun tipis secara teoritis, sebagian karena ia meminjam kerangka dari bidang atau latar lain tanpa lebih dahulu menguji kesesuaiannya. Kerangka kebocoran merupakan salah satu pinjaman semacam itu.

2.4 Perantara Digital sebagai Saluran Baru

Perkembangan yang belum banyak masuk ke dalam kerangka kebocoran adalah menguatnya peran perantara digital.

Yeager dkk. (2023) mengonseptkan akomodasi antarperorangan sebagai disrupsi dalam sistem pariwisata perkotaan, yang mengubah cara wisatawan berhubungan dengan ruang kota sekaligus membawa akibat pada pengelolaan kapasitas. Dari sudut pandang artikel ini, yang lebih penting adalah bahwa perantara digital menyisipkan satu lapisan pengambilan nilai yang sebelumnya tidak ada, dan lapisan tersebut umumnya berkedudukan di luar kota bahkan di luar negeri.

Weng dkk. (2022) menunjukkan hubungan antara permintaan setempat, mutu tempat, dan daya saing pariwisata perkotaan, yang mengingatkan bahwa perekonomian wisata kota tidak dapat dipisahkan dari perekonomian kota secara keseluruhan. López-Gay dkk. (2021) memperlihatkan bagaimana pariwisata mengubah komposisi penduduk dan harga di kawasan tertentu, yang juga merupakan bentuk perpindahan nilai meskipun jarang dihitung sebagai kebocoran.

Zhang (2023) menunjukkan bahwa hubungan antara pariwisata dan ketimpangan bersifat tidak linear, sehingga kenaikan penerimaan kawasan tidak dengan sendirinya berarti pemerataan. Parviznejad dan Akhavan (2021) menganalisis dampak skenario industri pariwisata terhadap perekonomian kota dan menegaskan pentingnya memperhatikan sebaran manfaat.

Rahmad dkk. (2025) menempatkan efek pengganda, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan daerah sebagai tiga jalur dampak ekonomi pariwisata perkotaan. Penempatan tersebut tepat, tetapi ketiga jalur itu baru bekerja apabila nilainya tertahan cukup lama di dalam kota.

3. METODE

Artikel ini merupakan artikel konseptual yang disusun melalui telaah pustaka integratif mengikuti pedoman Torraco (2005) dan Snyder (2019). Pendekatan ini dipilih karena tujuannya adalah menguji kesesuaian sebuah kerangka yang sudah mapan terhadap konteks yang berbeda, lalu menyusun kerangka penggantinya.

Pustaka yang ditelaah dikelompokkan menjadi empat rumpun. Rumpun pertama adalah literatur efek pengganda dan pengukuran dampak ekonomi kepariwisataan. Rumpun kedua adalah literatur kebocoran ekonomi beserta kritik terhadapnya. Rumpun ketiga adalah kajian kebocoran berlatar Indonesia. Rumpun keempat adalah literatur pariwisata perkotaan mutakhir yang menyentuh perantara digital dan perubahan struktur ekonomi kawasan.

Dua kajian Indonesia dipakai sebagai bahan pembacaan utama, yaitu Margayawati dkk. (2025) untuk Kabupaten Badung dan Here dan Solihin (2026) untuk Nusa Tenggara Timur. Keduanya dipakai bukan sebagai pembandingan kota, melainkan justru sebagai penanda batas, yaitu untuk memperlihatkan bentuk kerangka yang berlaku pada destinasi bercorak enklave dan untuk menunjukkan mengapa kerangka tersebut memerlukan penyesuaian ketika dipindahkan ke kota. Terbitan neraca satelit pariwisata (BPS, 2025) dipakai untuk membahas celah pengukuran, bukan untuk menarik angka.

Keterbatasan artikel ini perlu dinyatakan dengan jelas. Artikel ini tidak melakukan survei belanja wisatawan, tidak menelusuri rantai pasok usaha kepariwisataan, dan tidak menghitung besaran kebocoran pada kota mana pun. Angka yang disebut berasal dari kajian terdahulu dan dilaporkan kembali sebagai temuan pihak lain. Kerangka yang diusulkan bersifat gagasan yang masih memerlukan pengujian melalui pengumpulan data primer.

4. HASIL

4.1 Mengapa Kerangka Enklave Tidak Cukup untuk Kota

Perbandingan antara keadaan destinasi bercorak enklave dan keadaan kota disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Keadaan Destinasi Enklave dan Destinasi Perkotaan

Aspek	Destinasi bercorak enklave	Destinasi perkotaan
Batas kawasan	Cukup jelas, sering berupa kawasan terpadu	Kabur, kegiatan wisata menyebar di seluruh kota
Ragam perekonomian	Sempit, sangat bergantung pada pariwisata	Luas, pariwisata hanya sebagian kecil dari perekonomian
Bentuk kebocoran	Terang, berupa impor dan kepemilikan asing yang mudah dikenali	Tersamar, menyerupai transaksi bisnis biasa
Arah aliran keluar	Terutama ke luar negeri	Terutama ke kota lain di dalam negeri, terutama ibu kota
Kemudahan pengukuran	Relatif mudah karena pelakunya sedikit dan terpusat	Sulit karena pelakunya sangat banyak dan menyebar
Alat yang tersedia	Survei usaha pada kawasan terbatas	Hampir tidak ada, neraca satelit hanya tersedia pada tingkat nasional

Sumber: hasil analisis penulis

Perbandingan tersebut memperlihatkan mengapa kebocoran perkotaan jarang dibahas. Bukan karena besarnya kecil, melainkan karena bentuknya tidak menarik perhatian. Ketika sebuah hotel di kota membeli bahan makanan dari distributor nasional, tidak ada yang menyebutnya kebocoran. Ketika sebuah restoran waralaba mengirimkan bagian penerimaan ke kantor pusat di kota lain, itu tercatat sebagai kewajiban kontrak yang wajar. Semua tampak biasa, dan justru itulah yang membuatnya luput dari perhatian.

4.2 Dua Jenis Kebocoran yang Selama Ini Bercampur

Artikel ini mengajukan pembedaan yang tampak sederhana namun berakibat besar pada pengukuran.

Jenis pertama adalah kebocoran nasional, yaitu bagian belanja wisatawan yang mengalir ke luar negeri. Bentuknya meliputi pembayaran barang impor, pembayaran jasa perantara berkedudukan asing, pengiriman laba kepada pemilik asing, serta pembayaran kepada tenaga kerja asing. Jenis inilah yang menjadi perhatian utama literatur kebocoran sejak Britton (1982).

Jenis kedua adalah kebocoran kewilayahan, yaitu bagian belanja wisatawan yang tetap berada di dalam negeri tetapi meninggalkan kota tempat belanja itu terjadi. Bentuknya meliputi pembayaran kepada pemasok dari kota lain, pengiriman laba kepada kantor pusat jaringan usaha, pembayaran waralaba, serta upah yang dikirimkan pekerja pendatang ke daerah asalnya.

Perbedaan antara keduanya menentukan segalanya bagi pemerintah kota. Dari sudut pandang nasional, kebocoran jenis kedua bukan kebocoran sama sekali, karena uangnya tetap berada dalam perekonomian Indonesia. Dari sudut pandang kota, kebocoran jenis kedua sama saja akibatnya dengan kebocoran jenis pertama, karena uang tersebut sama-sama tidak berputar lagi di kota tersebut.

Di sinilah letak celah pengukuran yang serius. Neraca satelit pariwisata disusun pada tingkat nasional (BPS, 2025; United Nations dkk., 2010), sehingga aliran nilai dari kota daerah menuju kantor pusat di ibu kota tidak tercatat sebagai kebocoran. Akibatnya, sebuah kota dapat mengalami kebocoran kewilayahan yang sangat besar tanpa satu pun angka resmi yang menunjukkannya.

Dugaan yang diajukan artikel ini adalah bahwa pada kota-kota besar Indonesia di luar Jakarta, kebocoran kewilayahan kemungkinan lebih besar daripada kebocoran nasional. Dugaan ini bersandar pada penalaran mengenai struktur kepemilikan usaha kepariwisataan, di mana jaringan hotel, waralaba makanan dan minuman, serta peritel modern umumnya berkantor pusat di ibu kota. Dugaan ini belum diuji dan justru karena itu diajukan sebagai agenda riset.

4.3 Empat Pintu Kebocoran Perkotaan

Berdasarkan telaah tersebut, artikel ini menyusun kerangka empat pintu sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Empat Pintu Kebocoran pada Pariwisata Perkotaan

Pintu	Cara nilai keluar	Penerima di luar kota	Kemudahan diukur	Ungkitan kebijakan
Rantai pasok	Pembelian bahan makanan, perlengkapan, dan bahan bangunan dari luar kota atau impor	Pemasok dan distributor nasional	Menengah, melalui survei belanja usaha	Pertemuan pembeli dan pemasok setempat, pembinaan mutu dan kesinambungan pasokan
Kepemilikan dan laba	Pengiriman laba, biaya waralaba, dan biaya pengelolaan kepada pemilik atau jaringan	Kantor pusat jaringan usaha, umumnya di ibu kota	Sulit, memerlukan data keuangan usaha	Insentif bagi usaha berbadan hukum setempat, kemitraan kepemilikan
Perantara digital	Potongan komisi pemesanan, pembayaran, dan pengantaran	Perusahaan lokapasar dan platform, sebagian berkedudukan asing	Menengah, melalui survei pelaku usaha	Penguatan saluran pemesanan langsung, pengelompokan usaha kecil agar posisi tawar naik
Tenaga kerja dan pengetahuan	Upah tinggi bagi tenaga pendatang yang sebagian dibelanjakan di luar kota, serta terbatasnya alih pengetahuan	Pekerja pendatang dan daerah asalnya	Menengah, melalui survei ketenagakerjaan	Pendidikan vokasi setempat, syarat alih pengetahuan pada perizinan usaha besar

Sumber: hasil analisis penulis, dikembangkan dari Britton (1982), Meyer (2007), Mitchell dan Ashley (2010), serta Yeager dkk. (2023)

Empat pintu ini tidak sama bobotnya pada setiap kota. Kota dengan pertanian sekitar yang kuat memiliki kebocoran rantai pasok yang lebih kecil. Kota yang usaha kepariwisataannya dikuasai jaringan nasional memiliki kebocoran kepemilikan yang lebih besar. Karena itu kerangka ini dimaksudkan sebagai alat diagnosis, bukan sebagai pernyataan tentang keadaan semua kota.

4.4 Pintu Rantai Pasok

Pintu ini merupakan pintu yang paling banyak dibahas dalam literatur dan sekaligus yang paling mudah ditangani, meskipun penanganannya tidak sesederhana yang dibayangkan.

Usaha kepariwisataan di kota, terutama hotel dan restoran berskala menengah ke atas, umumnya membeli melalui distributor karena tiga alasan yang semuanya masuk akal dari sudut pandang usaha. Alasan pertama adalah kesinambungan pasokan, karena usaha membutuhkan jumlah tertentu setiap hari tanpa terputus. Alasan kedua adalah keseragaman mutu, karena tamu mengharapkan hidangan yang sama pada kunjungan berikutnya. Alasan ketiga adalah ketertiban administrasi, karena usaha berbadan hukum membutuhkan faktur dan bukti pembayaran yang tertib.

Pemasok setempat berskala kecil sering gagal memenuhi ketiganya, bukan karena mutu produknya rendah, melainkan karena skala dan kelembagaannya belum memadai. Karena itu anjuran agar hotel membeli dari petani setempat sering tidak berjalan meskipun semua pihak menyetujuinya.

Mitchell dan Ashley (2010) menunjukkan bahwa penguatan keterkaitan semacam ini menuntut pekerjaan pada sisi pemasok, bukan sekedar imbauan pada sisi pembeli. Yang dibutuhkan adalah pengelompokan pemasok agar skalanya memadai, pendampingan mutu, serta pengaturan pembayaran yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil. Meyer (2007) menyebut pergeseran perhatian dari kebocoran menuju keterkaitan sebagai cara pandang yang lebih membuahkan hasil, dan pada pintu inilah pergeseran itu paling terasa gunanya.

4.5 Pintu Kepemilikan dan Laba

Pintu ini merupakan pintu yang paling besar nilainya dan paling sulit ditangani.

Ketika sebuah kota berhasil menarik kunjungan, yang pertama merespons umumnya adalah jaringan usaha nasional, karena merekalah yang memiliki modal dan kemampuan membaca pasar. Hasilnya, pertumbuhan usaha kepariwisataan di kota daerah sering berupa masuknya cabang jaringan, bukan tumbuhnya usaha setempat. Pertumbuhan itu nyata dan tercatat, tetapi sebagian nilainya mengalir keluar melalui biaya pengelolaan, biaya waralaba, dan pengiriman laba.

Perlu ditegaskan bahwa kehadiran jaringan usaha bukan hal buruk. Jaringan membawa mutu layanan, saluran pemasaran, dan pekerjaan. Persoalannya bukan kehadirannya, melainkan tidak adanya upaya menumbuhkan pemilik setempat secara bersamaan, sehingga setelah sepuluh tahun kota tersebut memiliki lebih banyak kamar hotel namun tidak memiliki lebih banyak pemilik hotel.

Temuan Margayawati dkk. (2025) mengenai penguasaan usaha oleh pihak luar di Kabupaten Badung menunjukkan bentuk pintu ini pada tingkat yang ekstrem. Pada kota-kota besar Indonesia bentuknya lebih halus, karena pemiliknya bukan pihak asing melainkan jaringan nasional, sehingga tidak menimbulkan perasaan kehilangan yang sama meskipun akibat ekonominya bagi kota tersebut serupa.

4.6 Pintu Perantara Digital

Pintu ini paling baru dan paling cepat membesar.

Perantara digital menyisipkan lapisan pengambilan nilai pada hampir setiap tahap perjalanan wisatawan. Pemesanan penginapan melalui lokapasar dikenai komisi. Pembayaran melalui dompet digital dikenai potongan. Pemesanan makanan melalui aplikasi pengantaran dikenai potongan yang lebih besar lagi. Setiap potongan tersebut kecil bila dilihat satu per satu, tetapi terkumpul menjadi besar bila dilihat pada tingkat kota.

Yang membuat pintu ini khas adalah bahwa ia mengenai justru pelaku usaha kecil yang selama ini diandalkan sebagai penerima manfaat pariwisata. Usaha besar memiliki saluran pemesanan sendiri dan posisi tawar untuk menegosiasikan tarif komisi. Warung dan penginapan kecil tidak memiliki keduanya, sehingga bagian nilai yang keluar dari mereka justru lebih besar secara nisbi.

Yeager dkk. (2023) menempatkan gejala ini dalam kerangka disrupsi sistem pariwisata perkotaan. Bagi artikel ini, yang perlu ditambahkan adalah bahwa disrupsi tersebut bukan hanya persoalan persaingan usaha, melainkan juga persoalan arah aliran nilai, dan arah tersebut mengarah keluar dari kota.

4.7 Pintu Tenaga Kerja dan Pengetahuan

Pintu ini paling jarang dibahas namun berakibat paling panjang.

Ketika usaha kepariwisataan berskala besar masuk ke sebuah kota, posisi yang menuntut keahlian tinggi umumnya diisi tenaga dari luar kota, sementara warga setempat mengisi posisi yang menuntut keahlian lebih rendah. Akibatnya ada dua. Akibat pertama bersifat langsung, yaitu sebagian upah tinggi tersebut dibelanjakan atau dikirimkan ke luar kota. Akibat kedua bersifat jangka panjang dan lebih menentukan, yaitu tidak terjadinya alih pengetahuan yang memungkinkan warga setempat naik ke posisi tersebut pada masa berikutnya.

Akibat kedua inilah yang membuat pintu ini berbeda dari ketiga pintu lainnya. Kebocoran rantai pasok dan kebocoran komisi bersifat berulang namun tidak menutup kemungkinan perbaikan. Kebocoran pengetahuan bersifat menutup, karena ia mengekalkan keadaan yang menyebabkannya.

Here dan Solihin (2026) menyimpulkan pada kasus Nusa Tenggara Timur bahwa pertumbuhan kunjungan tidak menghasilkan perbaikan kesejahteraan yang sepadan. Salah satu penjelasan yang masuk akal bagi pola semacam itu adalah bahwa penduduk setempat memang terlibat, tetapi terlibat pada bagian rantai nilai yang nilainya paling rendah.

4.8 Perbedaan Profil Wisatawan Nusantara dan Mancanegara

Satu pembedaan lagi perlu ditambahkan karena ia mengubah bobot keempat pintu secara berarti.

Pariwisata perkotaan Indonesia sebagian besar digerakkan wisatawan nusantara, bukan wisatawan mancanegara. Perbedaan ini penting karena pola belanja keduanya berbeda, dan karena itu pintu kebocoran yang dominan pun berbeda.

Wisatawan mancanegara cenderung memakai akomodasi berjangkauan, memesan melalui lokapasar internasional, dan mengonsumsi produk dengan kandungan impor yang lebih tinggi. Bagi kelompok ini, pintu kepemilikan dan pintu perantara digital cenderung lebih besar, dan sebagian kebocorannya bersifat nasional karena mengalir ke luar negeri.

Wisatawan nusantara cenderung memakai penginapan berskala menengah dan kecil, berbelanja di gerai makanan setempat, dan memakai layanan pengantaran serta pembayaran digital dalam negeri. Bagi kelompok ini, pintu perantara digital tetap besar tetapi kebocorannya bersifat kewilayahan, karena penerimanya berkedudukan di dalam negeri. Pintu rantai pasok juga menjadi lebih menentukan karena belanjanya banyak jatuh pada makanan dan minuman.

Akibat dari perbedaan ini cukup jelas bagi kebijakan. Kota yang pasarnya didominasi wisatawan nusantara tidak akan memperoleh banyak manfaat dari kebijakan yang meniru pengalaman destinasi yang pasarnya didominasi wisatawan mancanegara, karena pintu yang perlu ditangani memang tidak sama. Penguraian nilai tertahan menurut asal pasar karena itu perlu dilakukan secara terpisah.

5. PEMBAHASAN

5.1 Dari Persentase Kebocoran Menuju Nilai Tertahan

Peringatan Sandbrook (2010) perlu ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Angka persentase kebocoran memiliki tiga kelemahan yang membuatnya kurang berguna bagi pengambil keputusan.

Kelemahan pertama, angka tersebut menyiratkan penilaian moral yang belum tentu tepat. Membeli barang dari luar kota bukan kesalahan, dan sebagian pembelian semacam itu justru menurunkan biaya sehingga menguntungkan usaha setempat.

Kelemahan kedua, angka tersebut sangat bergantung pada batas yang dipilih. Kebocoran sebuah kota berbeda dengan kebocoran sebuah kawasan di dalam kota itu, dan berbeda lagi dengan kebocoran provinsinya. Tanpa penetapan batas yang tegas, angka kebocoran mudah dipakai untuk mendukung kesimpulan apa pun.

Kelemahan ketiga, angka tersebut tidak menunjukkan apa yang harus dikerjakan. Mengetahui bahwa kebocoran sebesar enam puluh persen tidak memberi tahu pintu mana yang harus ditangani lebih dahulu.

Sebagai gantinya, artikel ini mengusulkan ukuran yang berbentuk positif, yaitu nilai tertahan setempat untuk setiap satu juta rupiah belanja wisatawan. Ukuran ini menyatakan berapa rupiah

dari setiap satu juta rupiah yang dibelanjakan wisatawan masih berada di dalam kota setelah putaran pertama dan putaran kedua, disertai penguraian menurut empat pintu.

Ukuran semacam ini memiliki tiga keunggulan. Ia berbentuk positif sehingga mendorong pembicaraan tentang cara menambah, bukan tentang siapa yang bersalah. Ia dapat diuraikan menurut pintu sehingga langsung menunjuk pekerjaan yang perlu dilakukan. Dan ia dapat dibandingkan antarwaktu pada kota yang sama, sehingga kemajuan dapat diperiksa.

5.2 Cara Mengumpulkan Datanya

Ukuran tersebut menuntut data yang selama ini tidak dikumpulkan, tetapi tidak menuntut sistem yang mahal.

Data pertama adalah pola belanja wisatawan menurut jenis pengeluaran, yang dapat dikumpulkan melalui survei pengunjung berkala pada beberapa titik kunjungan utama. Survei semacam ini sudah lazim dilakukan dinas pariwisata, hanya perlu ditambah rincian jenis pengeluaran dan cara pembayarannya.

Data kedua adalah pola belanja usaha kepariwisataan, yang dapat dikumpulkan melalui survei terhadap contoh usaha akomodasi dan penyediaan makanan minuman. Pertanyaannya sederhana, yaitu berapa bagian pembelian yang berasal dari dalam kota, dari luar kota, dan dari impor. Survei semacam ini merupakan bagian yang paling sering hilang, padahal justru paling menentukan.

Data ketiga adalah struktur kepemilikan dan pengelolaan usaha, yang sebagian sudah tersedia pada perizinan berusaha dan tinggal ditertibkan pengelompokannya.

Data keempat adalah pola ketenagakerjaan menurut tingkat jabatan dan asal daerah, yang dapat diperoleh melalui survei yang sama dengan data kedua.

Gabungan keempatnya sudah cukup untuk menghasilkan perkiraan nilai tertahan yang memadai bagi keperluan kebijakan kota, meskipun belum setara dengan ketelitian neraca satelit. Bagi pengambil keputusan, perkiraan yang tersedia setiap tahun lebih berguna daripada ketelitian yang tidak pernah tersedia.

5.3 Ilustrasi Cara Kerja Ukuran yang Diusulkan

Agar ukuran nilai tertahan tidak berhenti sebagai gagasan, berikut ilustrasi cara kerjanya. Perlu ditegaskan bahwa angka dalam ilustrasi ini merupakan angka rekaan yang dipakai untuk menjelaskan tata caranya, bukan hasil pengukuran pada kota mana pun.

Andaikan seorang wisatawan nusantara membelanjakan satu juta rupiah dalam kunjungannya ke sebuah kota, dengan sebaran belanja pada penginapan, makanan dan minuman, transportasi setempat, cendera mata, dan tiket masuk. Langkah pertama adalah membagi belanja itu menurut jenisnya berdasarkan hasil survei pengunjung.

Langkah kedua adalah menerapkan hasil survei belanja usaha pada setiap jenis. Apabila usaha penginapan pada kota tersebut membeli sekian bagian kebutuhannya dari dalam kota, maka bagian itulah yang bertahan pada putaran pertama, sementara sisanya keluar melalui pintu rantai pasok. Perlakuan yang sama diterapkan pada jenis belanja lainnya.

Langkah ketiga adalah mengurangi bagian yang keluar melalui pintu kepemilikan, yaitu perkiraan pengiriman laba dan biaya pengelolaan pada usaha yang berkantor pusat di luar kota, serta bagian yang keluar melalui pintu perantara digital berupa potongan komisi.

Langkah keempat adalah memperhitungkan upah. Bagian upah yang diterima pekerja yang bertempat tinggal di kota tersebut umumnya berputar kembali di dalam kota, sementara upah yang dikirimkan ke luar kota tidak.

Hasil akhirnya berupa satu angka, misalnya bahwa dari satu juta rupiah belanja wisatawan terdapat sekian ratus ribu rupiah yang masih berada di dalam kota setelah putaran kedua, disertai penguraian menurut empat pintu tadi. Angka itulah yang berguna bagi pengambil keputusan, karena penguraiannya langsung menunjukkan pintu mana yang paling besar dan karenanya paling layak ditangani lebih dahulu.

Yang perlu ditekankan adalah bahwa ketelitian angka ini tidak perlu setinggi ketelitian neraca satelit. Bagi keperluan kebijakan kota, perkiraan yang disusun dengan cara yang sama setiap tahun sudah cukup, karena yang dicari adalah arah perubahan dan bukan angka mutlak.

5.4 Implikasi bagi Kebijakan Kota

Dari analisis di atas dapat diturunkan lima implikasi.

Implikasi pertama menyangkut ukuran keberhasilan pariwisata kota. Selama keberhasilan diukur dengan jumlah kunjungan, kebijakan akan terus terdorong menambah kunjungan meskipun nilai tertahannya rendah. Menambahkan nilai tertahan sebagai ukuran kedua mengubah arah tersebut tanpa perlu meninggalkan ukuran yang ada.

Implikasi kedua menyangkut pintu yang perlu ditangani lebih dahulu. Pintu rantai pasok merupakan titik masuk yang paling masuk akal karena ungukitannya jelas dan hasilnya terlihat dalam waktu menengah. Pintu kepemilikan menuntut kebijakan yang lebih panjang. Pintu perantara digital menuntut kerja sama dengan pihak di luar kewenangan kota. Pintu tenaga kerja menuntut kerja sama dengan lembaga pendidikan.

Implikasi ketiga menyangkut bentuk dukungan bagi pemasok setempat. Anjuran agar usaha kepariwisataan membeli dari pemasok setempat hanya berjalan apabila pemasoknya sanggup memenuhi syarat kesinambungan, mutu, dan ketertiban administrasi. Karena itu dukungan sebaiknya diarahkan pada pembentukan kelompok pemasok dan pada pendampingan mutu, bukan pada imbauan.

Implikasi keempat menyangkut perizinan usaha berskala besar. Persyaratan yang berkaitan dengan pembelian dari pemasok setempat dan dengan alih pengetahuan kepada tenaga kerja setempat dapat dilekatkan pada perizinan, sepanjang dirumuskan secara wajar dan dapat diperiksa. Persyaratan yang berlebihan justru akan menghambat penanaman modal, sehingga perumusannya menuntut kehati-hatian.

Implikasi kelima menyangkut posisi tawar usaha kecil terhadap perantara digital. Kota tidak dapat mengatur tarif komisi platform, tetapi kota dapat membantu usaha kecil membangun saluran pemesanan bersama dan memperkuat kedudukan mereka melalui pengelompokan. Langkah semacam ini tidak menghapus pintu tersebut, tetapi mempersempitnya.

5.5 Batas Keberlakuan dan Catatan Kritis

Sejumlah batas perlu dinyatakan.

Batas pertama menyangkut sifat artikel. Kerangka empat pintu dan dugaan mengenai besarnya kebocoran kewilayahan disusun berdasarkan penalaran dan telaah pustaka, bukan berdasarkan pengukuran. Keduanya diajukan sebagai gagasan yang perlu diuji, dan pengujiannya justru merupakan sumbangan yang paling dibutuhkan.

Batas kedua menyangkut kemungkinan penyalahgunaan gagasan. Pembicaraan tentang kebocoran mudah bergeser menjadi sikap menolak modal dari luar. Sikap semacam itu tidak dianjurkan artikel ini. Kota membutuhkan modal, jaringan, dan pengetahuan dari luar, dan menutup pintu terhadap ketiganya akan merugikan kota itu sendiri. Yang diusulkan bukan menutup pintu, melainkan memperbesar bagian yang tertahan.

Batas ketiga menyangkut kesulitan pengukuran pintu kepemilikan. Data keuangan usaha bersifat tertutup dan tidak dapat dituntut keterbukaannya oleh pemerintah kota. Karena itu pengukuran pada pintu ini kemungkinan hanya dapat dilakukan melalui perkiraan berdasarkan struktur usaha, bukan melalui angka yang tepat.

Batas keempat menyangkut keterbatasan kewenangan kota. Tiga dari empat pintu berada sebagian di luar kewenangan pemerintah kota, karena menyangkut perpajakan nasional, pengaturan platform digital, dan kebijakan penanaman modal. Karena itu kerangka ini perlu dibaca sebagai alat untuk memahami keadaan dan untuk menetapkan urutan pekerjaan, bukan sebagai daftar hal yang seluruhnya dapat diselesaikan sendiri oleh kota.

5.6 Sumbangan Teoritis

Sumbangan teoritis artikel ini terletak pada tiga hal.

Pertama, artikel ini memindahkan kerangka kebocoran dari latar destinasi bercorak enklave menuju latar perkotaan, dan menunjukkan bahwa pemindahan tersebut menuntut perubahan bentuk Karanganyar, bukan sekedar penggantian objeknya.

Kedua, artikel ini mengajukan perbedaan antara kebocoran nasional dan kebocoran kewilayahan, beserta penunjukan celah pengukuran yang timbul karena neraca satelit disusun pada tingkat nasional. Perbedaan ini sederhana namun memiliki akibat langsung pada apa yang dapat diketahui pemerintah kota tentang perekonomiannya sendiri.

Ketiga, artikel ini mengusulkan pergeseran ukuran dari persentase kebocoran menuju nilai tertahan setempat, sejalan dengan peringatan Sandbrook (2010) bahwa yang lebih berarti adalah berapa yang tertahan dan bukan berapa yang keluar. Pergeseran ini mengubah pembicaraan kebijakan dari nada keluhan menjadi nada pekerjaan.

6. KESIMPULAN

Artikel ini berangkat dari janji efek pengganda yang muncul di hampir setiap dokumen pengembangan pariwisata perkotaan Indonesia namun jarang diuji. Penjelasan yang diajukan adalah bahwa besaran pengganda ditentukan oleh seberapa lama nilai tertahan di dalam kota, dan bahwa kerangka yang tersedia untuk memeriksanya berasal dari latar yang berbeda.

Kajian kebocoran ekonomi kepariwisataan di Indonesia berkembang terutama pada destinasi bercorak enklave, dengan kerangka yang mengandaikan kawasan wisata yang terpisah dari perekonomian sekitarnya. Kota tidak berperilaku demikian, sehingga kebocoran di kota tidak tampak sebagai aliran yang terang melainkan tersamar di dalam transaksi bisnis biasa.

Sebagai jawaban, artikel ini menyusun kerangka empat pintu kebocoran perkotaan, yaitu pintu rantai pasok, pintu kepemilikan dan laba, pintu perantara digital, serta pintu tenaga kerja dan pengetahuan. Keempatnya memiliki cara kerja, kemudahan pengukuran, dan ungkitan kebijakan yang berbeda, sehingga penanganannya pun harus berbeda.

Artikel ini juga mengajukan perbedaan antara kebocoran nasional yang mengalir ke luar negeri dan kebocoran kewilayahan yang mengalir ke kota lain di dalam negeri. Perbedaan ini menunjuk satu celah pengukuran yang nyata, karena neraca satelit pariwisata disusun pada tingkat nasional sehingga kebocoran jenis kedua tidak tercatat sebagai kebocoran sama sekali, padahal bagi kota akibatnya sama.

Sebagai ukuran yang lebih berguna, artikel ini mengusulkan nilai tertahan setempat untuk setiap satu juta rupiah belanja wisatawan, diuraikan menurut empat pintu tersebut. Ukuran ini berbentuk positif, menunjuk pekerjaan yang perlu dilakukan, dan dapat dibandingkan antarwaktu.

Keterbatasan artikel ini bersifat mendasar, yaitu sifatnya yang konseptual dan tidak disertai pengukuran. Karena itu agenda riset lanjutan yang paling mendesak ada empat. Pertama, survei belanja usaha kepariwisataan pada satu kota besar untuk memperkirakan bagian pembelian yang berasal dari dalam kota, yang merupakan data paling menentukan dan paling sering hilang. Kedua, pengujian dugaan bahwa kebocoran kewilayahan pada kota besar di luar ibu kota lebih besar daripada kebocoran nasionalnya. Ketiga, pengukuran besaran pengambilan nilai oleh perantara digital pada usaha kecil di kawasan wisata perkotaan. Keempat, penyusunan dan pengujian tata

cara penghitungan nilai tertahan setempat yang cukup sederhana untuk dijalankan pemerintah kota setiap tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, W. (2013). Leakages in the tourism systems: Case of Zanzibar. *Tourism Review*, 68(1), 62–76.
- Archer, B., & Fletcher, J. (1996). The economic impact of tourism in the Seychelles. *Annals of Tourism Research*, 23(1), 32–47.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Tourism satellite account Indonesia 2019–2023* (Katalog 8401007). Badan Pusat Statistik.
- Britton, S. G. (1982). The political economy of tourism in the Third World. *Annals of Tourism Research*, 9(3), 331–358.
- Fletcher, J. E. (1989). Input-output analysis and tourism impact studies. *Annals of Tourism Research*, 16(4), 514–529.
- Here, L. A., & Solihin, A. (2026). Pertumbuhan tanpa pemerataan: Analisis fenomena enclave tourism dan kebocoran ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 9(2), 193–198. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v9i2.2254>
- Lejárraga, I., & Walkenhorst, P. (2010). On linkages and leakages: Measuring the secondary effects of tourism. *Applied Economics Letters*, 17(5), 417–421.
- López-Gay, A., Cocola-Gant, A., & Russo, A. P. (2021). Urban tourism and population change: Gentrification in the age of mobilities. *Population, Space and Place*, 27(1), e2380.
- Margayawati, N. L. P., Dewi, N. D. U., & Widnyani, I. A. P. S. (2025). Problems of tourism leakage in Badung Regency due to foreign tourist invasion. *Journal of Sustainable Tourism and Entrepreneurship*, 6(3), 295–306. <https://doi.org/10.35912/joste.v6i3.2651>
- Meyer, D. (2007). Pro-poor tourism: From leakages to linkages. A conceptual framework for creating linkages between the accommodation sector and poor neighbouring communities. *Current Issues in Tourism*, 10(6), 558–583.
- Mitchell, J., & Ashley, C. (2010). *Tourism and poverty reduction: Pathways to prosperity*. Earthscan.
- Page, S. J., & Duignan, M. (2023). Progress in tourism management: Is urban tourism a paradoxical research domain? Progress since 2011 and prospects for the future. *Tourism Management*, 98, 104737.

Parviznejad, P. S., & Akhavan, A. N. (2021). Impact of the tourism industry scenarios in urban economy: Case study Tabriz. *International Journal of Innovation in Management, Economics and Social Sciences*, 1(1), 1–15.

Rahmad, M., Riyadi, A., Rachman, A. F., Muhandiansyah, D., Hastriana, E., Asmaniaty, F., Oktadiana, H., Hutagalung, M. H., Rahmanita, M., Widyastuti, N., Nurbaeti, Oktovianus, Inkadijaya, R., & Rianto. (2025). *Pariwisata perkotaan: Teori, perencanaan, dan implementasi*. Rama Asia Wisata.

Sandbrook, C. G. (2010). Putting leakage in its place: The significance of retained tourism revenue in the local context in rural Uganda. *Journal of International Development*, 22(1), 124–136.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.

Torraco, R. J. (2005). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. *Human Resource Development Review*, 4(3), 356–367.

United Nations, Eurostat, Organisation for Economic Co-operation and Development, & World Tourism Organization. (2010). *Tourism satellite account: Recommended methodological framework 2008*. United Nations.

Weng, J., Xiao, J., & Yu, L. (2022). Local demand, quality of place, and urban tourism competitiveness. *Frontiers in Psychology*, 12, 817805.

Yeager, E., Boley, B. B., & Goetcheus, C. (2023). Conceptualizing peer-to-peer accommodations as disruptions in the urban tourism system. *Journal of Sustainable Tourism*, 31(2), 504–519.

Zhang, J. (2023). The nonlinear effects of tourism on rural income inequality and urban–rural income inequality: Evidence from China. *Tourism Economics*, 29(1), 172–193.